

MODEL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS *FOLKLORE* DALAM MEMBINA *CIVIC CULTURE* CALON GURU SEKOLAH DASAR

S. Nailul Muna Aljamaliah^{*)}, Agil Nanggala, Tita Mulyati, Dinie Anggraeni Dewi, Ayu Rahmawati, Alya Rahmadiyah, Yona Wahyuningsih

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: syifanailul@upi.edu

Riwayat Artikel : diterima: 23 November 2024; direvisi: 5 Desember 2024; disetujui: 14 Desember 2024

Abstrak.

Riset ini berupaya merampungkan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar. Riset ini dirampungkan berbasis tradisi kualitatif dengan metode *literature review* dengan peneliti selaku instrumen kunci atau hidup untuk menelaah literatur yang berkaitan dengan substansi dan konsep penelitian, analisis data yaitu reduksi, *display* dan juga verifikasi. Hasil penelitian yaitu, pertama, model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, selaras dengan teori atau tradisi kewarganegaraan komunitarian, pendekatan kewarganegaraan Pancasila, lalu kapabel direalisasikan selaku *civic education* yang sifatnya formal, kurikuler dan teoretis juga selaku *citizenship education* yang sifatnya non-formal, sosio-kultural dan praktis untuk penguatan *civic competence*, kedua, model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, relevan dengan kurikulum PKn yang harus adaptif juga mengakomodir *local wisdom*, dan berprinsip *student centered learning*, maka bersifat modern, demokratis juga objektif, termasuk memuat *community service* dalam kerangka *citizenship education* selaku wahana peningkatan *civic engagement* mahasiswa pada pelestarian *folklore*, *local wisdom* dan kebudayaan nusantara secara sukarela dan berkualitas. Kesimpulan penelitian yaitu model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* bersifat integratif dan holistik, selaku titik temu atas adaptasi PKn pada modernisasi juga tanggung jawab PKn pada pelestarian kebudayaan nusantara dan habituasi *civic culture* pada calon guru sekolah dasar.

Kata Kunci: *civic culture; folklore; local wisdom*

CITIZENSHIP EDUCATION MODEL IN HIGHER EDUCATION BASED ON *FOLKLORE* IN DEVELOPING *CIVIC CULTURE* OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

Abstract. This research seeks to complete a civic education model in higher education based on *folklore* to foster *civic culture* in the younger generation. This research was completed based on qualitative traditions using literature review methods, data analysis, namely reduction, display and verification. The results of the research are, first, a civic education model in higher education based on *folklore* to foster *civic culture* for the younger generation, in line with the theory or tradition of communitarian citizenship, the Pancasila citizenship approach, then capable of being realized as formal, curricular and theoretical *citizenship education* as well as civic education which is it is non-formal, socio-cultural and practical in nature to strengthen civic competence, secondly, the civic education model in higher education is *folklore*-based to foster *civic culture* in the younger generation, relevant to the civics curriculum which must be adaptive and accommodate *local wisdom*, and has the principle of student centered learning, then is modern, democratic and objective, including community service within the framework of *citizenship education* as a vehicle for increasing student civic engagement in the voluntary and quality preservation of *folklore*, *local wisdom* and Indonesian culture. The research conclusion is that the Civic education model in higher education is based on *folklore* to foster *civic culture* which is integrative and holistic, as a meeting point for the adaptation of Civics to modernization as well as the responsibility of Civics in preserving Indonesian culture and habituation to *civic culture* in the younger generation.

Keywords: *civic culture; folklore; local wisdom.*

I. PENDAHULUAN

Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi bersifat penting dalam membina *civic awareness*, *civic virtue*, *civic engagement*, *civic responsibility* dan *civic culture* mahasiswa, selaku representasi *smart and good young citizens*, maka PKn perlu berkomitmen dalam memuat kebudayaan nusantara atau kearifan lokal. *Cultural citizenship* minim dikaji dalam PKn, walau eksistensinya penting untuk menganalisis perilaku kewarganegaraan dalam konteks budaya, untuk mengoptimalkan budaya yang

multikultur secara efektif untuk membentuk karakter dan demokrasi kewarganegaraan (Stevenson, 2010). Tren modernisasi dan digitalisasi pada Abad Ke-21, tidak boleh menjadi dalih dalam mengesampingkan kajian atau materi kebudayaan nusantara atau kearifan lokal, tetapi harus menjadi wahana kolaborasi, agar siasat sosialisasi kearifan lokal dan kebudayaan nusantara bersifat adaptif dan relevan pada calon guru sekolah dasar. PKn konsisten berinovasi supaya relevan dengan kebutuhan modernisasi, tetapi tidak boleh melupakan ciri khas kebangsaan dan masyarakat,

seperti modernisasi PKn di China yang berkomitmen memuat sejarah peradaban dan perjuangan masyarakat China (Zhao & Lee, 2023). Realitas PKn di perguruan tinggi yang belum secara nyata memuat kajian *folklore* selaku representasi kebudayaan nusantara dan kearifan lokal Indonesia adalah kritik sosial bersama.

Sejatinya upaya penyelesaian model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, membuat pembelajaran PKn secara tersurat memuat kajian atau materi *folklore* selaku cerita rakyat yang memuat nilai-nilai positif dalam kehidupan, seperti Malin Kundang yang menjadi wahana refleksi sosial tentang pentingnya karakter anak yang Sholeh dan berbakti kepada orang tua. *Folklore* mampu menjadi sumber pembelajaran sosial dan sejarah, karena memuat ragam ajaran dan nilai positif yang bisa dibiasakan pada siswa, seperti rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa, lalu menjadi wahana pelestarian budaya lokal berbasis pelibatan siswa (Romadi & Kurniawan, 2017). Akomodasi kajian *folklore* dalam PKn di perguruan tinggi bersifat transformatif dan inovatif, karena kapabel membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, agar bersifat proporsional, yaitu keterampilan dalam berteknologi digital bisa disertai literasi budaya nusantara selaku cerminan *civic culture*. Esensi *civic culture* adalah representasi keadaban, modernisasi, kebudayaan dan *local wisdom* dalam suatu entitas politik atau komunitas masyarakat, maka penguatan *civic culture* masyarakat secara holistik, secara langsung membawa masyarakat menjadi lebih transformatif. Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* berpotensi dalam membina *civic culture* calon guru sekolah dasar secara demokratis, inklusif juga objektif.

Mata kuliah PKn di perguruan tinggi merupakan pembelajaran wajib bagi mahasiswa, maka hal ini menjadi sasaran pembinaan strategis *civic culture* pemuda dengan memuat kajian *folklore* secara holistik. PKn tidak dapat dipisahkan dari kajian *local wisdom*, karena menjadi sumber pembelajaran PKn untuk membina sikap humanis dan peka sosial, seperti realisasi tradisi irung-irung di Kab. Bandung Barat yang mampu memperkuat *civic engagement* warga negara muda dalam kerangka PKn (Nanggala & Malihah, 2020). PKn di perguruan tinggi harus memuat kajian *folklore*, agar menjadi *civic campaign* dalam membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, dan melestarikan kearifan lokal atau kebudayaan nusantara, terlebih PKn dimandatkan selaku pendidikan budaya di masyarakat, maka semakin menjadi rasionalisasi logis dan basis moral dalam memuat kajian *folklore*. Pembelajaran PKn harus berbasiskan *local wisdom*, karena secara nyata mencerminkan Pancasila, karena mampu membangun tanggung jawab sosial, rasa cinta tanah air, toleransi dan kreatif, terlebih PKn yang memuat *local wisdom* tidak menjadi dalih melupakan teknologi digital (Sumardjoko & Mursiam, 2018). Mental *civic culture* harus dimiliki oleh calon guru sekolah dasar, supaya patriotik, inklusif, berwawasan budaya, serta senantiasa mencintai Indonesia berbasis partisipasinya yang bermutu.

Pembelajaran PKn di perguruan tinggi dapat direalisasikan selaku *civic education* atau PKn kurikuler dan teoretis di dalam kelas, juga selaku *citizenship education* atau

PKn sosio-kultural dan praktis di masyarakat, membuat pembinaan *civic culture* melalui PKn yang memuat kajian *folklore* bersifat holistik, juga berfokus pada kearifan lokal. Kajian *folklore* lazim termuat pada pembelajaran bahasa dan sastra, untuk penguatan literasi budaya, karakter humanis, dan kreativitas, juga selaku wahana ajakan persuasif pada siswa untuk terlibat dalam melestarikan kebudayaan lokal di masyarakat (Baan, 2021). Perampungan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar bersifat transformatif dan revolusioner, karena berupaya mengintegrasikan *local wisdom* berbasis *folklore* dengan teknologi digital, supaya lebih adaptif juga menarik atensi mahasiswa. Kurikulum PKn harus modern, profesional dan proporsional, seperti upaya pemerintah dan akademisi di Inggris untuk merampungkan kurikulum PKn yang memuat kajian demokrasi, hak sipil, *civic culture*, keterampilan dan partisipasi siswa juga sejarah Inggris secara koheren (Watts, 2006). Akomodasi kajian *folklore* pada PKn di perguruan tinggi, selain berpotensi membina *civic culture* calon guru sekolah dasar yang komprehensif, juga berpotensi membangun *civic community* yang menjamin pelestarian kearifan lokal.

Penyelesaian riset ini bersifat penting untuk memperkuat disiplin ilmu PKn untuk memuat kajian *folklore*, sehingga memperkuat PKn dalam konteks *civic culture* yang sifatnya non-formal, lalu membuat praktik pembelajaran PKn di perguruan tinggi semakin holistik dan inovatif, karena memuat kajian *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, agar terlibat aktif dalam melestarikan kearifan lokal, juga berpartisipasi untuk kepentingan sosial secara sukarela dan bermutu. *Civic culture* mengakomodasi komitmen dan partisipasi warga negara pada stabilitas politik, kesejahteraan ekonomi, pemerintahan yang bersih lalu melayani, karena *civic culture* mencerminkan warga negara yang berbudaya, cerdas juga inklusif (Bacot, 2008). Novelty yang ditargetkan yaitu dirampungkannya model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, dengan memuat tahapan pembelajaran secara koheren dan holistik.

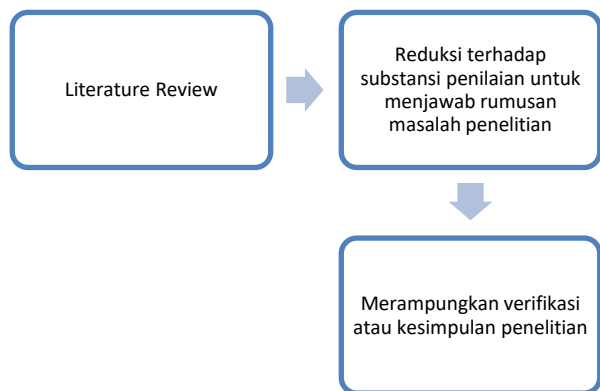
Kontribusi teoretis yang ditargetkan yaitu dirampungkannya kajian ilmiah berbasis naskah jurnal tentang model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, lalu kontribusi praktik yang ditargetkan yaitu menjadi *civic action* melalui PKn berbasis *folklore* di perguruan tinggi yang membina *civic culture* calon guru sekolah dasar secara inklusif, utuh dan demokratis. Penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan cerita rakyat sebagai penanaman etika untuk membentuk pendidikan karakter siswa sekolah dasar oleh Fadhilal, *et al.* (2022) yang menegaskan akomodasi cerita rakyat pada pembelajaran di SD, mampu memperkuat etika dan karakter siswa. Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar adalah titik temu antara PKn progresif dan PKn berkearifan lokal, karena berwawasan Pancasila, maka bermanfaat untuk PKn yang konsisten memuat kebudayaan nusantara selaku sumber pembentukan karakter dan *civic culture* calon guru

sekolah dasar, di tengah realitas modernisasi PKn akibat revolusi industri 4.0

II. METODE PENELITIAN

Riset ini diimplementasikan melalui pendekatan kualitatif dengan metode literature review, untuk menganalisis ragam hasil riset yang eksis pada jurnal internasional dan nasional, yang berkaitan dengan model PKn secara formal dan non-formal di perguruan tinggi, kajian *folklore* atau cerita rakyat, *local wisdom*, *civic competence*, lalu *civic culture*, untuk perampungan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* dalam membina *civic culture* calon guru sekolah dasar. Literature review berupaya memperoleh esensi atau inti atas hasil riset yang dipelajari peneliti, untuk mengkombinasikan, mengkritik juga menemukan kebaruan secara objektif (Furlong, 2023).

Praktik literature review pada riset ini berfokus pada 32 jurnal internasional, 15 jurnal nasional, satu buku juga satu dokumen resmi negara, yang dianalisis juga direfleksikan secara mendalam selaku basis ilmiah perampungan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar. Mengingat sumber data pada riset ini terbagi atas sumber primer, yaitu jurnal internasional bereputasi juga jurnal nasional terakreditasi karena memiliki keabsahan bersifat mumpuni, lalu sumber sekunder yaitu buku dan dokumen resmi milik negara, agar hasil riset lebih komprehensif. Analisis data mengoptimalkan teknik Miles (Huberman & Saldana, 2014) yang menegaskan analisis data kualitatif secara gradual, yaitu reduksi, display juga verifikasi.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Bagaimana relevansi Model PKn di perguruan tinggi berbasis folklore untuk membina civic culture calon guru sekolah dasar terhadap tradisi komunitarian, pendekatan kewarganegaraan pancasila, civic education, citizenship education dan visi civic competences?*

Perampungan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar berfokus pada PKn selaku *civic education* atau PKn formal juga PKn selaku *citizenship education* atau PKn non-formal, maka bersifat teoretis juga praktis dalam membina *civic culture* calon guru sekolah dasar. *Civic culture* perlu dihabituasikan secara persisten pada warga negara, selaku

pondasi membangun peradaban modern dan berbudaya, lalu *civic culture* kapabel menjadi wahana komunitas lintas budaya untuk kehidupan yang inklusif dan harmonis (Reese & Rosenfeld, 2008). Realitas Indonesia yang multikultur secara budaya dan plural secara agama membuat eksistensi *folklore* atau cerita rakyat menjadi masif, lalu memiliki pelajaran moral, etika dan nilai tertentu yang bermanfaat positif dalam membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, membuat PKn harus akomodatif dengan memuat kajian *folklore* agar semakin inklusif, adaptif juga komprehensif. *Civic culture* memuat kebajikan hidup dan menegaskan karakteristik atas komunitas masyarakat tertentu, lalu *folklore* memuat studi kasus tentang ajaran moral dari cerita rakyat tertentu, seperti Tongkat Tunggal Panaluan yang mengajarkan nilai-nilai agama, kejujuran, tanggung jawab dan kepedulian sosial (Hess, 2016; Nadaek, et al. 2020). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar merepresentasikan teori kewarganegaraan komunitarian dan pendekatan kewarganegaraan Pancasila, karena relevan.

Akomodasi kajian *folklore* dalam PKn di perguruan tinggi untuk menjadi model pembelajaran holistik yang bisa membina *civic culture* calon guru sekolah dasar bersifat relevan dengan teori kewarganegaraan komunitarian, karena mengutamakan kebersamaan juga kebudayaan kewarganegaraan untuk persatuan sosial atau spirit kolektivitas. Substansi teori komunitarian mengakomodir persatuan sosial atau kebersamaan kewarganegaraan pada realitas masyarakat multikultur, untuk harmoni sosial, maka mengatasi perpecahan sosial (Etzioni, 2011). Visi pembinaan *civic culture* calon guru sekolah dasar dalam model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore*, mencerminkan warga negara muda yang cinta damai, inklusif, toleran, humanis juga bertanggung jawab, mengingat *civic culture* bersumber pada Pancasila, dan menegaskan pentingnya pelibatan warga negara dalam membangun peradaban bangsa. Eksistensi *folklore* mampu menjadi pendidikan moral, seperti yang termuat pada cerita rakyat Putri Pinang Masak mengajarkan daya juang, hati nurani, tanggung jawab moral juga kewajiban, sehingga *folklore* harus disosialisasikan pada calon guru sekolah dasar, supaya berkompeten (Sabrina & Shomary, 2024). Perampungan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* bersifat relevan dengan teori atau tradisi kewarganegaraan komunitarian, karena secara persis menekankan urgensi kebersamaan dan optimasi kebudayaan untuk membentuk warga negara yang humanis,

Sejatinya model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, begitu mencerminkan nilai-nilai pancasila karena *civic culture* di Indonesia berbasis pancasila, juga *folklore* mencerminkan kebudayaan nusantara atau kearifan lokal yang terakomodir pada pancasila, selaku esensi atau inti kebudayaan di Indonesia. Masyarakat Indonesia bersifat multikultur dan memiliki prinsip lalu jati diri kebudayaannya secara mandiri, maka pendekatan kewarganegaraan paling relevan untuk Indonesia, yaitu Pancasila (Manik & Samsuri, 2021). PKn memiliki tanggung jawab juga tugas yang berat, yaitu memastikan setiap warga negara Indonesia cerdas,

berkompeten, melek teknologi dan memiliki literasi budaya mumpuni, maka akomodasi kajian *folklore*, membuat pembelajaran PKn di perguruan tinggi semakin efektif dalam membina *civic culture* dan *civic competence* calon guru sekolah dasar. *Civic education* adalah wahana pendidikan karakter, melatih pemikiran kritis dan pembinaan moral calon guru sekolah dasar, selanjutnya *civic education* adalah wahana vital dalam mengatasi marjinalisasi yang menimpa minoritas, karena mengutamakan kesetaraan warga negara (Lu, 2024; Addington, 2016). Upaya akademik merampungkan model PKn pada perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* warga negara muda bersifat relevan dengan pendekatan kewarganegaraan pancasila, tentu membuat PKn semakin inklusif juga transformatif.

Substansi pembelajaran PKn tidak bisa terlepas dari *local wisdom*, mengingat selaku sumber pembelajaran strategis dalam membina *civic culture*, *civic awareness* dan *civic engagement* calon guru sekolah dasar, supaya senantiasa berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan nusantara, juga hidup dengan berbudaya, agar tidak *chaos*. Eksistensi nilai tidak bisa dipisahkan dengan PKn, maka menjadi wahana transformasi *civic value*, agar pemuda memahami dan menerapkan tanggung jawab kewarganegaraan mereka, di Amerika Serikat nilai-nilai kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat kehidupan berdemokrasi dan literasi politik warga negara (Stoddard, 2023). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar begitu memuat nilai, moral, etika dan karakter yang mencerminkan pancasila, karena *folklore* adalah cerita rakyat nusantara yang mengajarkan urgensi kebajikan, sikap religius juga bertanggung jawab. PKn berupaya membentuk siswa yang berkompeten, agar mampu berdemokrasi, melestarikan nilai-nilai kebangsaan, berpartisipasi sosial, lalu memberi rekomendasi mengenai *civic action* yang selaras dengan kebajikan sipil (Bauml, et al. 2023). Perampungan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* menjadi wahana vital dalam membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, agar humanis, inklusif, toleran, jujur, bertanggung jawab sosial dan berintegritas.

Pertama, akomodasi kajian *folklore* terhadap PKn berparadigma *civic education* pada perguruan tinggi untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, berfokus pada aksi formal dan teoretis di dalam kelas selaku wahana ilmiah memperkuat pemahaman dan literasi mahasiswa mengenai kebudayaan nusantara, cerita rakyat, *local wisdom* juga pancasila untuk membina karakter *civic culture*, inklusif dan humanis, lalu terampil juga terlibat dalam pelestarian budaya Indonesia, juga aksi filantropi berbasis *folklore*. *Civic education* berupaya memperkuat *civic capacity* warga negara, selaku representasi kemampuan atau kompetensi untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, termasuk menjadi landasan berpartisipasi politik dan sosial, lalu PKn menjamin pelestarian *local wisdom* (Cohen, 2021; Adriyanto, et al. 2023). Optimalisasi model PKn selaku *civic education* di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk pembinaan *civic culture* adalah wahana strategis sosialisasi juga habituasi secara formal tentang *civic culture*, *folklore*, *local wisdom*,

ragam kebudayaan nusantara dan nilai-nilai pancasila pada mahasiswa, terlebih PKn selaku *civic education* memuat pemikiran kritis, analisis kasus dan diskusi, sehingga holistik, objektif, dan representatif. Eksistensi calon guru sekolah dasar harus diberikan pembelajaran kewarganegaraan agar berkarakter altruistik, cinta budaya, humanis, adil, patriotik juga bertanggung jawab moral, lalu kajian *folklore* bisa memperkuat literasi budaya warga negara (Bennett, et al. 2009; Andriani, 2018). Model PKn selaku *civic education* di perguruan tinggi berbasis *folklore*, selain mampu membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, juga mampu memperkuat kapasitas *civic competence* secara utuh.

Kedua, kajian *folklore* pada PKn berparadigma *citizenship education* di perguruan tinggi untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, berfokus pada upaya nyata non-formal dan praktis di masyarakat selaku wahana vital melibatkan mahasiswa dalam pelestarian kebudayaan nusantara, mengenalkan mahasiswa pada *folklore* juga *local wisdom* yang terdapat di masyarakat secara praktis, maka menjadi pembelajaran PKn yang komprehensif dan kontekstual. Eksistensi *citizenship education* adalah wahana vital untuk memperkuat *civic engagement* siswa, karena memuat pendidikan karakter, simulasi politik juga *service learning* untuk mengatasi masalah sosial, melestarikan nilai dan budaya bangsa, memberdayakan masyarakat dan membina karakter kepemimpinan siswa (Maulana et al., 2023).

Model PKn *citizenship education* di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, tidak sebatas sosialisasi kajian *folklore* juga *civic culture* pada mahasiswa, tetapi dilibatkan langsung di masyarakat untuk menelaah juga merefleksikan realitas *folklore*, *local wisdom*, dan *civic culture*, yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan tingkat atensi masyarakat, agar mahasiswa memiliki spirit moral pancasila untuk berkontribusi melestarikan *folklore*, *local wisdom* atau kebudayaan nusantara yang inovatif dan persisten. *Citizenship education* bersifat praktis di masyarakat dan kontekstual, maka mampu memperkuat *civic knowledge*, *civic skills*, serta *civic engagement* siswa dalam mengatasi problematik sosial, lalu *folklore* mampu memperkuat karakter siswa dan kecintaan terhadap budaya Indonesia (Maiello, et al. 2003; Johan, et al. 2021). Model PKn selaku *citizenship education* di perguruan tinggi berbasis *folklore*, tidak hanya berfokus dalam membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, tetapi juga menjadi wahana strategis pelestarian kebudayaan Indonesia berbasis *civic engagement* warga negara muda.

Sejatinya model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore*, tidak hanya memuat visi pembinaan *civic culture* calon guru sekolah dasar, tetapi juga mengakomodasi visi penguatan mutu *civic competence* mahasiswa selaku calon guru sekolah dasar, terlebih konsep *civic culture* dengan konsep *civic competence* saling beresonansi dan melengkapi, sehingga praktik pelestarian kebudayaan nusantara oleh calon guru sekolah dasar dalam kerangka PKn berbasis *folklore* juga *civic culture*, bisa efektif juga modern, karena memuat *civic competence*. Esensi *civic competence* yang digagas Branson

(1999) mengarah pada *civic knowledge*, *civic disposition*, juga *civic skills*, selaku indikator penting *smart and good citizens*, maka lazim dioptimalkan oleh *civic education* untuk mengukur efektivitas pembelajarannya (Kuang & Kennedy, 2021). Relevansi antara *civic culture* dengan *civic competence*, tercermin pada orientasinya, yaitu berupaya mewujudkan *smart and good citizens* atau di Indonesia berfokus pada warga negara yang pancasilais, tetapi *civic culture* lebih berfokus pada aksi non-formal yang berkaitan dengan budaya kewarganegaraan, selaku ajaran moral, karakter dan komunitas masyarakat, lalu *civic competence* lebih berfokus selaku visi dan muatan PKn formal dan non-formal, termasuk menjadi indikator penting sebagai warga negara ideal atau yang diharapkan oleh negara-bangsa, maka memiliki titik temu, yaitu secara persis berupaya membangun peradaban negara-bangsa yang holistik. *Civic action* di luar sekolah atau di masyarakat selain menjadi wahana strategis dalam mengatasi problematik sosial juga mampu memperkuat mutu *civic competence* siswa, lalu *civic culture* adalah wahana membangun demokrasi, layanan pemerintah yang baik dan peradaban yang mumpuni (LeCompte, et al. 2020; Andrews, 2007). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* adalah wahana pemembinaan *civic culture* dan *civic competence* calon guru sekolah dasar, sehingga berperan penting membangun peradaban bangsa berbasis kebudayaan Indonesia atau Pancasila.

Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar bersifat transformatif, karena tidak sebatas mengenalkan kembali ragam cerita rakyat, *local wisdom* dan kebudayaan nusantara yang memuat ajaran moral, etika, nilai dan karakter, tetapi juga melibatkan calon guru sekolah dasar secara langsung di masyarakat untuk menelaah juga merefleksikan realitas juga tantangan sosial yang berkaitan dengan *folklore*, *local wisdom* dan kebudayaan nusantara, lalu berkontribusi aktif pada upaya pelestariannya. *Civic education* yang transformatif harus memuat kajian dan isu sosial tentang demokrasi, marjinalisasi sosial, kebudayaan, perubahan iklim, human rights dan polarisasi politik (Hoggan-Kloubert & Mabrey, 2022). Substansi itu membuat model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar menjadi paradigma baru pembelajaran PKn yang integratif, karena menekankan urgensi akomodasi *folklore*, *local wisdom*, kebudayaan nusantara, juga *civic culture* ditengah tren modernisasi dan digitalisasi PKn. Konsep *civic education* di era digital berfokus pada aksi politik partisipatif, keterlibatan berdemokrasi dan akomodasi teknologi digital dalam interaksi warga negara dan pembelajaran secara formal, selanjutnya *folklore* bisa beradaptasi pada modernisasi, selaku wahana pendidikan nilai, karakter dan penguatan keterampilan membaca untuk siswa (Kahne, et al. 2016; Laia, 2024). Optimasi model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* membuat kajian pembelajaran PKn semakin holistik, dengan mengakomodir *folklore*, *local wisdom* dan kebudayaan nusantara, dan nilai-nilai Pancasila secara teoretis dan praktis untuk membina *civic culture* dan *civic competence* calon guru sekolah dasar.

B. Bagaimana Akomodasi Kurikulum, Prinsip Student Centered Learning, dan Community Service untuk Model PKn di perguruan tinggi berbasis folklore untuk membina civic culture calon guru sekolah dasar?

Sejatinya perampungan model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar harus terakomodasi pada kurikulum PKn secara formal di perguruan tinggi, agar secara tersurat memuat model PKn berbasis *folklore*, lalu menjadi *civic campaign* yang membina *civic culture* mahasiswa secara holistik juga transformatif. Kurikulum PKn bersifat formal dengan mengikuti kebijakan kurikulum nasional, maka perlu disertai inovasi dan demokratisasi kurikulum PKn di masyarakat supaya memberi pengalaman holistik juga empiris pada siswa (Komara, 2017). Model PKn perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar bisa membuat kurikulum PKn semakin holistik, karena memuat kajian *folklore*, kebudayaan nusantara, *local wisdom* juga *civic culture* secara formal, mengingat relevan dengan substansi kurikulum PKn, yaitu konsisten beradaptasi pada modernisasi yang disertai komitmen pada identitas Kebangsaan Indonesia. Perubahan paradigma kurikulum PKn di Australia mulai masif diwujudkan, agar tidak sebatas pemahaman materi tentang hak juga kewajiban kewarganegaraan, politik, budaya, demokrasi sosial, tetapi juga memuat tanggung jawab dan kesadaran siswa untuk terlibat dalam isu kewarganegaraan lokal, nasional dan global, terlebih muatan kurikulum PKn tidak bisa lepas dari kearifan lokal (Fozdar, & Martin, 2020; Rohman, 2019). Akomodasi model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar pada kurikulum PKn, bersifat vital dalam membangun peradaban Indonesia berwawasan *folklore*, kebudayaan nusantara, *local wisdom* juga *civic culture*, karena begitu merepresentasikan nilai-nilai Pancasila.

Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar tentu memandatkan mahasiswa selaku subjek pembelajaran, agar secara mandiri, objektif dan sukarela dalam memahami, menelaah juga merefleksikan kajian tentang *folklore*, kebudayaan nusantara, *local wisdom* juga *civic culture*, agar memiliki spirit moral untuk berkarakter inklusif, humanis, toleran, peka sosial juga sukarela selaku cerminan *civic culture* agar terlibat dan terampil dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa telah menjadi keharusan dalam pendidikan tinggi, selaku bukti pembelajaran modern, objektif dan demokratis agar mahasiswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya secara utuh, lalu membuat praktik pembelajaran lebih eksploratif, kontekstual juga mengaktifkan mahasiswa (Trinidad, 2019). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* berkomitmen untuk membina *civic culture* dan *civic competence* calon guru sekolah dasar secara demokratis, persisten dan utuh, maka untuk mendukung visi itu, harus disertai penerapan prinsip pembelajaran berpusat pada siswa supaya relevan dan transformatif. pembelajaran berpusat pada siswa bukan sebatas menjadikan siswa selaku subjek atau pusat pembelajaran, tetapi menjadi bukti tanggung jawab

moral dan prinsip pendidik dalam praktik pembelajarannya, lalu *local wisdom* bisa menarik atensi siswa untuk belajar dan membangun karakter positif siswa (McCabe & O'Connor, 2013; Suastra, et al.2017). Akomodasi prinsip pembelajaran berpusat pada siswa dalam model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar bersifat revolusioner, substantif, utuh dan relevan dengan realitas modernisasi, digitalisasi, juga revolusi industri 4.0.

Sejatinya model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar memuat model *community service* atau pengabdian masyarakat yang berfokus pada upaya pelestarian kearifan lokal di masyarakat berbasis keterlibatan mahasiswa secara sukarela juga berkualitas, termasuk menjadi praktik pembelajaran holistik yang mampu membina *civic awareness*, *civic culture*, *civic competence* juga *civic responsibility* mahasiswa secara integratif. Praktik pembelajaran pengabdian masyarakat berdampak positif pada peningkatan kemampuan beradaptasi, tanggung jawab sosial, inovasi dan etika mahasiswa, termasuk mengatasi problematik sosial bersifat kompleks (Pong & Leung, 2023). Akomodasi pengabdian masyarakat model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar menjadi wahana strategis untuk menelaah juga merefleksikan secara holistik tentang realitas, isu dan tantangan sosial yang berkaitan *folklore*, kebudayaan nusantara, *local wisdom* juga *civic culture*, agar calon guru sekolah dasar memiliki kesadaran, kesukarelaan dan komitmen untuk *civic action* melalui pengabdian masyarakat dalam melestarikan cerita rakyat, kebudayaan nusantara dan *local wisdom* agar mengarah pada *civic culture* dan *civic competence* calon guru sekolah dasar yang komprehensif. Kesukarelaan siswa melalui model *community engagement* mampu memperkuat tanggung jawab sosial, keterampilan profesional, inovasi dan pengalaman mumpuni, termasuk memberdayakan masyarakat secara substantif, lalu kearifan lokal mampu menjadi sumber pemberdayaan masyarakat (Chetty, & Bhagwan, 2021; Salim, 2021). Substansi model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar yang memuat model pengabdian masyarakat bersifat penting untuk peningkatan *civic engagement* mahasiswa dalam pelestarian kebudayaan Indonesia yang beragam dan kaya akan ajaran kebajikan.

Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar yang bisa direalisasikan berbasis paradigma *civic education* juga berbasis paradigma *citizenship education*, membuat praktik pembelajarannya bersifat holistik, karena selain untuk pembinaan *civic culture* dan literasi budaya berbasis *folklore* juga menjadi wahana strategis pelibatan calon guru sekolah dasar dalam pelestarian budaya Indonesia yang beragam dan unik. Konsep *citizenship education* memuat orientasi peningkatan mutu *civic competence* yang transformatif, inklusif dan persisten, supaya setiap warga negara senantiasa terlibat pada kepentingan atau urusan publik, kesetaraan sosial dan kehidupan berdemokrasi agar partisipatif (Joris, et al. 2022). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore*

untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar mengakomodasi model *hidden curriculum* pendidik, supaya praktik pembelajarannya lebih kontekstual, eksploratif dan reflektif, mengingat relevan dengan substansi *folklore* juga *civic culture* yang berupaya mengambil pelajaran positif atau kebajikan atas setiap cerita dan *local wisdom* juga konsensus kebangsaan, sehingga mahasiswa bisa berkembang secara utuh dengan mencerminkan *civic culture* juga *civic competence*. *Folklore* menjadi kekayaan nasional bagi negara yang tengah mengalami tren industrialisasi dan urbanisasi, seperti yang terjadi di Inggris, karena *folklore* mampu memperkuat rasa cinta pada budaya lokal lalu memuat kebajikan yang dapat diimplementasikan pada masyarakat, maka *folklore* harus dikodifikasi dan dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah (Roper, 2023). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar bersifat transformatif, karena tidak sebatas pembelajaran teoretis, tetapi juga praktis dan memuat pelestarian budaya.

Optimasi model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar membuat habituasi nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa menjadi lebih aktual, kontekstual dan partisipatif, karena selain bersifat formal juga non-formal, berbasis *civic engagement* mahasiswa untuk melestarikan *folklore*, *local wisdom* juga *civic culture*, lalu transformasi ajaran nilai, moral, etika dan karakter yang termuat pada kearifan lokal itu. *Local wisdom* kapabel menjadi basis pengembangan pembelajaran agama Islam, mengingat *local wisdom* di Palangka Raya menekankan urgensi aksi nyata pelestarian lingkungan hidup, dan karakter menjaga kebersihan, hidup sehat juga cinta lingkungan hidup (Erawati & Rahmayati, 2021). Implementasi model PKn di perguruan tinggi berbasiskan *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar yang memuat *community service*, menjadi wahana praktis dalam memperkuat *civic culture* juga *civic competence* mahasiswa, maka tidak boleh sebatas seremonial, tetapi harus secara melestarikan *folklore*, *local wisdom* atau kebudayaan nusantara juga *civic culture* secara sukarela, bermutu dan partisipatif. Upaya mewujudkan *community service* yang holistik, baik untuk mengatasi masalah sosial juga memperkuat kompetensi siswa, harus disertai pendampingan guru yang demokratis, seperti di Australia praktik *community service* turut melatih kolaborasi antara siswa, guru dan masyarakat (Butcher, et al. 2003). Model PKn di perguruan tinggi berbasiskan *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar memandang penting *local wisdom* selaku sumber pembangunan peradaban Indonesia.

Komitmen dan konsistensi dosen juga mahasiswa begitu penting dalam realisasi model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar yang substantif dan holistik, karena bukan sebatas sosialisasi *folklore*, kearifan lokal juga *civic culture*, tetapi menjadi wahana pembinaan literasi budaya, *civic culture* dan *civic competence* mahasiswa, termasuk pelibatan pemuda dalam pelestarian budaya di masyarakat secara sukarela dan bermutu. PKn adalah pembelajaran yang dapat direalisasikan di masyarakat juga di sekolah, karena

mengembangkan visi *civic equality*, *cultural literacy*, *civic responsibility* juga *civic action* karena mengoptimalkan partisipasi siswa dalam lingkungan sosial (Misco, 2004). Eksistensi *folklore* dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi begitu penting selaku wahana analisis dan refleksi sosial untuk mahasiswa, agar senantiasa mengambil pelajaran penting atas cerita rakyat itu, karena konsisten memuat keadaban hidup, dan moralitas untuk menjadi individu yang religius, humanis juga berdaya, terlebih model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar, menjadikan mahasiswa selaku subjek, mengingat berprinsip pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga bersifat relevan dengan konsep pedagogi modern dan demokratis. Cerita rakyat di Pacitan memuat ajaran strategis seperti jujur, religius, semangat kebangsaan, kreatif, cinta damai, daya juang, tanggung jawab sosial dan rasa ingin tahu (Setyawan *et al.*, 2017). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar menekankan pentingnya objektivitas pada praktik pembelajarannya agar calon guru sekolah dasar berkontribusi melestarikan kebudayaan Indonesia secara bermutu dan sukarela.

Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar mengimplementasikan prinsip pembelajaran berpusat pada siswa dan pengabdian pada masyarakat yang relevan dengan substansi kurikulum PKn, maka hal tersebut dapat menjadi paradigma baru, yaitu pembelajaran PKn yang transformatif, modern karena mengimplementasi *folklore*, *local wisdom* atau kebudayaan nusantara juga *civic culture*, untuk membangun peradaban Indonesia. Eksistensi *local wisdom* mampu memperkuat kebajikan dan sikap inklusif warga negara, lalu bisa dioptimalkan selaku wahana resolusi konflik pada masyarakat yang multikultur seperti di Indonesia (Diab, *et al.* 2022).

Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar berupaya membuat *local wisdom*, *folklore* juga *civic culture* menjadi isu kewarganegaraan yang strategis untuk ditelaah dan direfleksikan, selaku modal sosial memperkuat kapasitas *civic competence*, *civic culture* dan *civic engagement* mahasiswa selaku calon guru sekolah dasar dalam pelestarian kebudayaan Indonesia yang berkelanjutan, termasuk membuat PKn semakin holistik. PKn modern terdiri dari kajian budaya, isu global juga sosial, prinsip demokrasi dan kesetaraan, tetapi praktik pembelajaran dalam lingkup sosialnya yang sebatas berfokus pada kelas sosial, belum mengakomodasi gender dan masalah multikulturalisme yang menjadi persoalan serius dalam inovasi PKn, maka hal ini bersifat persisi dengan pedagogik kritis (Heggart, *et al.* 2018). Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar menekankan urgensi *civic action* mahasiswa dalam pelestarian budaya Indonesia selaku identitas, ketahanan juga kekuatan nasional.

IV. KESIMPULAN

Model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar bersifat

integratif, karena bisa direalisasikan secara formal atau teoretis juga non-formal atau praktis, termasuk membuat disiplin ilmu PKn holistik, terlebih relevan dengan teori atau tradisi komunitarian karena mengutamakan kebersamaan dan budaya kewarganegaraan lalu memuat pendekatan kewarganegaraan pancasila, karena eksistensi *folklore*, *local wisdom*, kebudayaan nusantara juga *civic culture* di Indonesia bersumber pada pancasila. Realisasi model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* dalam arti *civic education* bersifat kurikuler, formal juga teoretis di dalam kelas untuk membina *civic culture* dan *civic competence* warga negara muda yang transformatif. Sejatinnya model PKn di perguruan tinggi berbasis *folklore* untuk membina *civic culture* calon guru sekolah dasar mampu membuat kurikulum PKn semakin adaptif dan utuh. Praktik model PKn *citizenship education* di perguruan tinggi berbasis *folklore* memuat model pengabdian pada masyarakat agar mahasiswa mampu menelaah realitas *folklore*, *local wisdom* dan *civic culture* di masyarakat, sebagai penguatan *civic engagement* dan pembinaan *civic culture* calon guru sekolah dasar.

REFERENSI

- Addington, L. A. (2016). Using constitutional law classes to address the “civic empowerment gap” among inner-city public high school students. *Education And Urban Society*, 48(9), 807-826.
- Adriyanto, A., Muhammadiyah, M., & Bahri, S. (2023). Pengembangan bahan ajar pkn berbasis kearifan lokal subtema indahnya budaya negeriku pada siswa kelas iv upt sd negeri 97 kabupaten Pinrang. *Bosowa Journal of Education*, 4(1), 92-97.
- Andrews, R. (2007). *Civic culture* and public service failure: an empirical exploration. *Urban Studies*, 44(4), 845-863.
- Andriani, R. (2018). Pemanfaatan foklore berbasis multilingual untuk meningkatkan budaya literasi. *Metamorfosis: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 11(2), 7-11.
- Baan, A. (2021). *Folklore* in literature learning as a model for developing cultural characters and students 'personality. *SLLAC : Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*, 5(1), 83-93.
- Bacot, H. (2008). Civic culture as a policy premise: appraising charlotte's civic culture. *Journal of Urban Affairs*, 30(4), 389-417.
- Branson, M. S.(1999).*Belajar civic education dari Amerika*. LKIS.
- Butcher, J., Howard, P., Labone, E., Bailey, M., Smith, S. G., Mcfadden, M., Mcmeniman, M., Malone, K., & Martinez, K. (2003). Teacher education, community service learning and student efficacy for community engagement. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 31(2), 109-124.
- Chetty, K., & Bhagwan, R. (2021). Student volunteerism as a thread of community engagement: its salience to social work education. *Social Work Education*, 42(8), 1307-1326.

- Cohen, A. K., Pope, A., & Wong, K. K. (2021). Civic education and civic capacity in public schools: The state of the field and directions for the future. *Peabody Journal of Education*, 96(3), 229–234.
- Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8(1).
- Erawati, D., & Rahmayanti, R. (2021). Development of local wisdom-based islamic education learning material for secondary school students: A design-based research. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 148–165.
- Etzioni, A. (2011). Citizenship in a communitarian perspective. *Ethnicities*, 11(3), 336–349.
- Fozdar, F., & Martin, C. A. (2020). Constructing the postnational citizen?: Civic and citizenship education in the Australian national curriculum. *Journal of Curriculum Studies*, 52(3), 372–394.
- Furlong, D. E., & Lester, J. N. (2023). Toward a practice of qualitative methodological literature reviewing. *Qualitative Inquiry*, 29(6), 669–677.
- Heggart, K., Flowers, R., Burrige, N., & Arvanitakis, J. (2018). Refreshing critical pedagogy and citizenship education through the lens of justice and complexity pedagogy. *Global Studies of Childhood*, 8(4), 355–367.
- Hess, K. (2016). Power to the virtuous? Civic culture in the changing digital terrain. *Journalism Studies*, 17(7), 925–934.
- Johan, R. C., Cahyani, I., & Wibisono, Y. (2021). Digital media access: Folklore learning for cultivating love indonesian culture character. *Litera*, 20(3), 354–367.
- Joris, M., Simons, M., & Agirdag, O. (2022). Citizenship-as-competence, what else? Why european citizenship education policy threatens to fall short of its aims. *European Educational Research Journal*, 21(3), 484–503.
- Kahne, J., Hodgins, E., & Eidman-Aadahl, E. (2016). Redesigning civic education for the digital age: Participatory politics and the pursuit of democratic engagement. *Theory & Research in Social Education*, 44(1), 1–35.
- Komara, E. (2017). Curriculum and civic education teaching in Indonesia. *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, 10(1), 23–32.
- Kuang, X., & Kennedy, K. J. (2021). Alienated and disaffected students: Exploring the civic capacity of 'outsiders' in Latin America. *Education, Citizenship And Social Justice*, 16(1), 49–61.
- Laia, M. W. (2024). Pembuatan komik cerita rakyat buruti siraso dewi bibit untuk keterampilan membaca. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), 1705–1714.
- LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T. (2020). Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data. *The Journal Of Social Studies Research*, 44(1), 127–137.
- Lu, Y. C. (2024). The compatibility of character education and citizenship education in Aristotelian approaches to moral development. *Journal of Moral Education*, 1–15.
- Maiello, C., Oser, F., & Biedermann, H. (2003). Civic knowledge, civic skills and civic engagement. *European Educational Research Journal*, 2(3), 384–395.
- Manik, T. S., & Samsuri. (2021). Pendekatan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42–50.
- Maulana, M. Y., & Milanti, A. A. (2023). A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 341–358.
- McCabe, A., & O'Connor, U. (2013). Student-centred learning: The role and responsibility of the lecturer. *Teaching in Higher Education*, 19(4), 350–359.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook*, Edition 3. Sage Publications.
- Nadaek, L., Simbolon, M., Sitohang, R. Y., & Sembiring, Y. B. (2020). Moral value and characters building exposed in folklore of tongkat tunggal panaluan. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha*, 8(2), 92–96.
- Nanggala, A., & Malihah, E. (2020). Peran tradisi irung-irung dalam memperkuat civic engagement calon guru sekolah dasar di kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–16.
- Pong, H. K., & Leung, C. H. (2023). The impacts of community-service learning on career adaptability and on ethics and social responsibility of university students: An experimental study. *Journal of Education and Work*, 36(4), 251–269.
- Reese, L. A., & Rosenfeld, R. A. (2008). Introduction: Comparative civic culture. *Journal of Urban Affairs*, 30(4), 355–374.
- Rohman, T. (2019). Pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal di smk negeri 10 Bandung. *UCEJ*, 4(2), 169–184.
- Romadi., & Kurniawan, G. F. (2017). Pembelajaran sejarah lokal berbasis folklore untuk menanamkan nilai kearifan lokal kepada siswa. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 11(1), 79–94.
- Roper, J. (2023). Folklore in regional dictionaries: Twentieth- and twenty-first-century examples from England. *folklore*, 134(2), 226–241.
- Sabrina, D., & Shomary, S. (2024). Analisis nilai pendidikan moral dalam cerita rakyat putri pinang masak karya afrizal cik. *Sajak: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Sastra, Bahasa, Dan Pendidikan*, 3(2), 27–38.
- Salim, K. (2021). Pemberdayaan masyarakat berbasis tradisi lokal studi kelurahan Kalaodi Tidore Kepulauan-Maluku Utara. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(72), 8495–8512.

- Setyawan, A., Suwandi, S., & Slamet, S. Y. (2017). Muatan pendidikan karakter dalam cerita rakyat di Pacitan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 199-211.
- Stevenson, N. (2010). Cultural citizenship, education and democracy: redefining the good society. *Citizenship Studies*, 14(3), 275–291.
- Stoddard, S. V. (2023). The Civic value of education: How scholastic experiences create active citizens. *American Politics Research*, 51(4), 492-509.
- Suastra, I. W., Jatmiko, B., Ristiati, N.P., & Yasmini, L. P. B. (2017). Developing characters based on local wisdom of Bali in teaching physics in senior high school. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 6(2), 306-312.
- Sumardjoko, B., & Musyiam, M. (2018). Model of civic education learning based on the local wisdom for revitalizing values of pancasila. *Cakrawala Pendidikan*, 37(2), 201-211.
- Trinidad, J. E. (2019). Understanding student-centred learning in higher education: Students' and teachers' perceptions, challenges, and cognitive gaps. *Journal of Further and Higher Education*, 44(8), 1013–1023.
- Watts, M. (2006). Citizenship education revisited: Policy, participation and problems. *Pedagogy, Culture & Society*, 14(1), 83–97.
- Zhao, Z., & Lee, J. C. K. (2023). The meaning of life in China's civics curriculum: A comparative historical study on worldview construction. *Journal of Moral Education*, 53(3), 575–591.